KORAN **DIGITAL**

radar MEDIA TERDEPAN

RADAR PASER .COM

AKTUAL & TERPERCAYA

EDISI SENIN
6 NOV 2023

DPMPTSP PASER JEMPUT BOLA PENGURUSAN NIB BAGI PELAKU UMKM

BAWASLU KABUPATEN PASER MULAI TERTIBKAN ALGAKA

RADAR PASER .COM AKTUAL & TERPERCAYA

Pelaku UMKM di Kabupaten Paser

DPMPTSP PASER JEMPUT BOLA PENGURUSAN NIB BAGI PELAKU UMKM

PASER - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser jemput bola dalam mendaftarkan usaha para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser, Toto Ifrianto menjelaskan, upaya penerbitan NIB bagai para pelaku UMKM ini dilaksanakan hingga pertengahan Desember 2023 mendatang. Berbagai upaya dalam mendaftarkan jenis UMKM itu dengan membuka gerai disetiap kegiatan.

“Kami juga membuka stand pendampingan pembuatan NIB setiap minggu. Petugas akan menjelaskan dan membantu proses pembuatan jika berminat,” kata Toto.

Toto menjelaskan, pelaku UMKM bisa bertanya terlebih dahulu dalam memenuhi persyaratan dalam pembuatan NIB. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser berharap pelaku UMKM jenis usaha apa pun meskipun modal hanya sedikit, memiliki NIB untuk nama usahanya.

Menurutnya, pelaku UMKM banyak mendapat keuntungan jika memiliki NIB. Pasalnya, para pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas dan pengakuan resmi dari Pemerintah. Selain itu memudahkan proses pengurusan izin dan sertifikasi lainnya.

“Dengan membuat NIB, pelaku UMKM tidak perlu lagi membuat akta perusahaan seperti CV atau PT yang memerlukan dana besar ke notaris dan lainnya. Hanya cukup melampirkan KTP,” jelasnya.

NIB sebagai identitas resmi dapat digunakan sebagai jaminan atau bukti keberadaan usaha dalam memperoleh pinjaman, kredit, atau kerjasama dengan lembaga keuangan. Belum lagi peluang mengakses berbagai program dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.

“NIB juga berperan dalam memfasilitasi akses keuangan dan kerjasama dengan lembaga keuangan. Jadi syarat jika mau dapat bantuan dari pemerintah minimal punya NIB,” kata Toto.

Toto mengungkapkan, tujuan lainnya oleh Pemkab Paser memperbanyak UMKM yang memiliki NIB, agar perputaran ekonomi dan modal di Kabupaten Paser bisa lebih tinggi. Jumlah NIB ini jadi dasar investasi besar masuk ke suatu daerah.

“Ketidaktahuan masyarakat tentang izin usaha seperti NIB ini adalah ketakutan penagihan pajak di akhir tahun. Padahal untuk kelas UMKM yang omzetnya dibawah Rp 500 juta per tahun, tidak dikenakan pajak. Hanya wajib melapor,” pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

Ketua Bawaslu Kabupaten Paser, Nur Khamid.

BAWASLU KABUPATEN PASER MULAI TERTIBKAN ALGAKA

PASER - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser bersiap melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (Algaka) yang selama ini telah banyak memenuhi sisi jalan diseputaran Kabupaten Paser.

Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2003 tentang Kampanye dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser nomor 15 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

“Bawaslu akan mencabut algaka yang telah dianggap menyalahi aturan tersebut bersama aparat penegak hukum dan Satpol PP Kabupaten Paser,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Paser, Nur Khamid.

Ia menjelaskan, jadwal penertiban dilaksanakan sejak adanya penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser. Sehingga pihaknya mengingatkan lebih dahulu kepada Partai Politik (Parpol) untuk mencabut sendiri sebelum ditindak.

“Yang boleh dipasang hanya bendera parpol. Baliho, spanduk dan sejenis lainnya yang berbentuk fisik selain bendera tidak boleh sebelum tahapannya dimulai,” jelasnya Nur Khamid.

Algaka seperti Bakal Calon Presiden dan Bakala Calon Wakil Presiden, dilanjutkan Khamid, juga tidak diperbolehkan dipasang saat ini. Karena belum waktunya jadwal kampanye. Khamid menegaskan Bawaslu juga tidak akan tebang pilih dalam penertiban.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

radar. MEDIA

RADAR IBUKOTA .COM

KORAN **DIGITAL**

AKTUAL & TERPERCAYA

EDISI SENIN
6 NOV 2023

KUNJUNGAN KE DESA API-API, MAKMUR PASTIKAN PEMBANGUNAN 2 PPI TAHUN DEPAN

RATUSAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH PPU IKUTI PELATIHAN DIGITAL CITIZENSHIP

RADAR IBUKOTA .COM AKTUAL & TERPERCAYA

Pj Bupati PPU Makmur Marbun beserta rombongan saat mengunjungi PPI Desa Api-Api, Sabut (4/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

KUNJUNGAN KE DESA API-API, MAKMUR PASTIKAN PEMBANGUNAN 2 PPI TAHUN DEPAN

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, Sabtu (4/11/2023) melakukan peninjauan langsung ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Api-Api, Waru. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan aktifitas di pos pertama produk perikanan di Benuo Taka ini.

Dari kunjungan itu, mengungkapkan bahwa dirinya prihatin atas kondisi nelayan. Pasalnya, puluhan kapal nelayan di wilayah itu ketika akan bersandar setelah melaut harus menunggu berjam-jam karena kondisi PPI yang kurang mendukung.

“Nah ini harus didukung, kalau tidak kasihan nelayan Kita. Kapal mereka mau bersandar saja butuh waktu berjam karena kondisi PPI yang kurang mendukung,” katanya.

Ia juga mengungkapkan polemik dari aspek kewenangannya adanya PPI di daerah ini. Kewenangan PPI yang ada di masing-masing pemprov ini membuat kabupaten/kota sedikit kesulitan dalam mengembangkannya.

“PPI yang dulu memang merupakan kewenangan pusat, namun setelah undang-undang 27, maka kewenangan itu diserahkan ke provinsi yang saat itu jumlahnya sangat banyak,” jelasnya.

Sebelum diserahkan ke Pemprov, menurutnya harus ada kajian kelayakan dahulu. “Harusnya dipertahankan PPI yang memang betul-betul bisa melayani nelayan. Lah, kalau yang ini, ketika air surut saja tidak bisa sandar ngapain dipertahankan,” bebernya.

Lebih lanjut, Makmur menerangkan pihaknya telah melakukan koordinasi lebih jauh dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terkait untuk segera dibangunkan PPI di wilayah itu.

“Makanya saya minta kepada kementerian KKP yang sudah turun langsung ke sini bawah PPI ini harus dibangun di sini tidak boleh tidak. Saya kemarin minta 4 unit dan mengerucut menjadi dua. Tetapi saya minta yang dua PPI tersebut sudah harus terbangun di 2024 mendatang,” tutup Makmur. (ADV/SBK)

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membawa kedua pengusaha tersebut keliling lokasi pekan raya. (Robbi/MediaKaltimGroup)

MAKMUR AJAK BSB DAN KOPI DAENG BALIKPAPAN KEMBANGKAN UMKM EKRAF PPU

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengundang dua pengusaha ternama di Kaltim datang ke Pekan Raya UMKM Serambi Nusantara Sabtu malam (4/11/2023). Yaitu General Manager (GM) Balikpapan Super Blok (BSB) Yudhi Saharuddin dan Owner Kopi Daeng Harun.

Pada kesempatan tersebut, Makmur mengharapkan agar keduanya bisa membantu mengembangkan UMKM Benuo Taka. Karena menurutnya, UMKM di PPU sudah menjadi tulang punggung perekonomian di daerah.

Itu pula yang menjadi alasan Makmur mengadakan kegiatan ini selama 3 hari dalam setiap pekan. “UMKM kami beri ruang seluas-luasnya, tidak ada pungutan biaya disini alias semua gratis. Sekarang sudah banyak UMKM yang mau masuk. Untuk itu saya meminta pak Yudhi membantu saya, paling tidak kalau PPU belum bisa seperti Balikpapan, setidaknya PPU terang menderang dan indah setiap sudutnya,” ungkapnya.

Makmur berharap hadirnya GM BSM dan Owner Kopi Daeng ini dapat memberikan terobosan untuk bisa membantu dan memberi perhatian kepada PPU. Sebab, keduanya bisa dianggap telah sukses dalam mengembangkan usahanya masing-masing.

”Pak Yudhi tolong beri perhatian buat kabupaten ini, apa yang bapak perlukan dan dan apa yang harus kami siapkan, agar disampaikan. Semoga Penajam Super Blok bisa berdiri disini. Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh belanja,” sebutnya.

Sementara itu, GM BSB Yudhi Saharuddin menyampaikan bahwa PPU sangat potensial untuk dikembangkan lagi. Support untuk para pelaku UMKM juga luar biasa dan mereka mendapatkan ruang untuk mengangkat perekonomian masyarakat di PPU.

”Ini sih luar biasa, Saya melihat kondisi di PPU saat ini jika PPU konsisten terus dilakukan, saya yakin ini menjadi motor untuk menggerakkan ekonomi kreatif yang luar biasa di PPU ini,” ucapnya.

Yudhi juga menyampaikan bahwa ia sudah memiliki ide untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk PPU. “Saya sudah memiliki ide pak yang mau saya tawarkan di PPU, jadi nantinya PPU menjadi sentra pertama setelah IKN untuk ekonomi kerakyatan yang mana semua didalamnya ada UMKM dan ekonomi kreatif lainnya,” papar Yudhi.

Senada, Owner Kopi Daeng, Harun menambahkan bahwa pihaknya juga melirik PPU untuk lokasi pengembangan usaha. “Tentunya ini menjadi potensi yang baik apabila Kopi Daeng juga masuk ke dalam pembangunan perekonomian masyarakat PPU, yang mana akan kita coba melihat tempat yang cocok untuk pembangunannya sehingga mampu menjadi ruang untuk bersantai para kalangan muda maupun tua di PPU,” tutup Harun. (ADV/SBK)

RADAR IBUKOTA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun bersama Menteri PMK Muhadji Effendydan lainnya saat menghadiri pelatihan di UG, Jumat (3/11/2023) lalu. (Robbi/MediaKaltimGroup)

SIAP JADI PENYUPLAI DAGING IKN, UG GANDENG PEMKAB PPU GELAR PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SDM SEKTOR PETERNAKAN

PPU - Proyeksimigrasi atau mobiliasi penduduk seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu kesinambungan pasokan pangan. Hal ini membuka peluang besar bagi Penajam Paser Utara (PPU) untuk menjadi penyuplai utama.

Berbagai peluang dan tantangan ini menjadi topik diskusi dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Universitas Gunadarma (UG). Bekerjasama dengan Pemkab PPU melalui Dinas Pertanian (Distan) PPU yang digelar belum lama ini.

Para peserta juga mendapat motivasi tambahan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Yang memenuhi undangan dari Rektor UG, Margianti. Termasuk PJ Bupati PPU, Makmur Marbun juga hadir dan sekaligus mendampingi kunjungan Muhadjir.

Makmur berharap agar perguruan tinggi tidak boleh diam. Perguruan tinggi harus bisa melihat apa sesungguhnya yang diperlukan oleh bangsa dan pemerintah baik Provinsi dan juga Kabupaten.

“Salah satu yang saya lihat adalah SDM. Kalau SDM ini tidak kita buat, bagaimana menghadapi IKN sebagai Ibu Kota Negara. Oleh karena itu saya mengapresiasi terselenggaranya pelatihan yang dilaksanakan oleh Universitas Gunadarma di Kabupaten PPU ini,” ucapnya.

Pelatihan tersebut merupakan salah satu kegiatan dari program pembinaan UMKM berbasis kemitraan yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Dilaksanakan di Kampus Universitas Gunadarma PSDKU di Kecamatan Penajam pada tanggal 3 November 2023.

Peserta sebanyak 35 orang berdiskusi intensif dengan dua narasumber yaitu Didik Kurniadi dari Distan PPU, dan Fachriyan H Pasaribu. Keduanya memaparkan mengenai usaha meningkatkan produktifitas pada peternakan ayam dari sisi sumber daya manusia, kandang, pakan dan minum, serta obat dan vitamin, serta membahas pengaruh lingkungan terhadap budidaya peternakan ayam.

“Faktor-faktor penting pada tata kelola peternakan menjadi topik menarik bagi peserta pelatihan yang Sebagian besar masih tergolong usaha kecil,” jelasnya.

Peningkatan indek performa ayam, khususnya ayam pedaging atau ayam potong, menjadi target utama dalam bisnis ayam potong, Indeks peforma yang tinggi relatif menjanjikan keuntungan yang tinggi. Namun banyaknya faktor yang mempengaruhi kesehatan ayam memerlukan keseriusan dan daya tahan dari para pelaku usaha di sektor peternakan.

Dari pelatihan ini, terungkap pula bahwa pengelolaan peternakan ke depannya mulai bergeser. Dari cara tradisional menjadi cara yang lebih modern melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

“Kualitas tenaga kerja lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan membangun daerah. Khususnya Kabupaten PPU yang sangat strategis karena keberadaan Ibu Kota Nusantara yang sedang terus dibangun,” tutup Makmur. (ADV/SBK)

Pj Bupati PPU Makmur saat memimpin rakor. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PJ BUPATI PPU PANGGIL SELURH OPD TINDAKLANJUTI 7 PESAN PRESIDEN

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) memanggi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU. Serta menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah kunjungannya, Jumat (03/11/2023).

"Ada tujuh arahan Presiden yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh Pj Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia," ungkapnya, Sabut (4/11/2023).

Makmur mengarahkan semua yang hadir untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Dengan langkah melakukan operasi pasar dan pemantauan secara rutin dan berkelanjutan di pasar yang ada di PPU.

"Lakukan perencanaan tol laut sehingga barang kebutuhan pokok bisa langsung bersandar di pelabuhan Buluminung," tegas Makmur.

Makmur juga mengarahkan untuk mengalokasi anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat di perubahan APBD 2023. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan sesuai dengan kewenangan daerah.

Ia meminta untuk terus mendukung program prioritas pemerintah terkait penurunan kemiskinan, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri. "Lakukan pencermatan anggaran 2024 dan penyusunan dokumen perencanaan terkait hal tersebut," terangnya.

Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, Makmur meminta untuk menyederhanakan prosedur tata kelola khususnya dalam hal perizinan kepada investor. Untuk hal itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengacu kepada sistem online single submission (OSS).

Selanjutnya Makmur juga mengingatkan kepada semua OPD untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super El-Nino. Dengan segera menhoptimalisasi daya dukung sumber daya air baku PDAM dengan menggerakkan alat berat dari PUPR.

Selanjutnya, pada tahun politik ini pemerintah kabupaten harus mendukung Komisi Pemelihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN harus terjaga. Apabila terjadi pergolakan atau percikan-percikan yang berkaitan politik di masyarakat, Makmur meminta agar cepat segera diselesaikan permasalahan tersebut dengan damai.

"Saya ingatkan kembali kepada semua ASN jangan terlibat politik praktis," tutup Makmur. (**ADV/SBK)**

RADAR IBUKOTA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menghadiri pelaksanaan hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Kampus PSDKU Universitas Gunadarma PPU, Jum'at (03/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

DUKUNG REVOLUSI MENTAL DI PPU, SALING MENDUKUNG KEMAJUAN BERSAMA

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menegaskan bahwa perguruan tinggi patut mengambil peran dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian untuk menyejahterakan masyarakat.

Ia mengungkapkan itu saat menghadiri pelaksanaan hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Gelaran Kemenko PMK dan Forum Rektor Indonesia dalam program Pembinaan UMKM dari Ditjen DIKTI Ristek di Kampus PSDKU Universitas Gunadarma PPU, Jum'at (03/11/2023).

"Perguruan tinggi harus melihat, sebenarnya apa kira-kira yang diperlukan oleh bangsa dan pemerintah, Provinsi dan juga Kabupaten khususnya PPU," ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Rektor Universitas Gunadarma, Margianti serta Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Didik Suhardi.

"Salah satu yang saya lihat, adalah sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia ini tidak kita buat, bagaimana menghadapi IKN sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.

Selain itu, tantangan lebih besar juga ada di masyarakat di PPU ini. Sebab, secara usia yang masih 21 tahun, harus mampu untuk menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) dari berbagai sektor.

"Tidak bisa disalahkan Kabupaten PPU yang baru berusia 21 Tahun, Kabupaten yang belum siap menjadi Ibu Kota Negara. Tetapi dengan adanya kebijakan nasional, Kabupaten PPU tentunya harus siap dan segera menyediakan SDM nya," bebernya.

Satu hal yang patut dilakukan dalam mengondusifkan situasi ini ialah dengan mendukung penuh sektor penghidupan masyarakat. Salah satunya ialah mendorong iklim perekonomian daerah tetap terjaga dengan baik.

"Saya sudah buat edaran bahwa seluruh ASN harus memakai batik produksi PPU. Kedua, saya juga membuat edaran untuk seluruh ASN harus memanfaatkan dan menggunakan seluruh produk lokal, tidak boleh mengambil pangan lokal dari luar. Yang ketiga, tidak ada rapat di kantor pemerintahan wilayah kabupaten PPU yang menghidangkan makanan dari luar," pungkas Makmur. (ADV/SBK)

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka kegiatan. (Robbi/MediaKaltimGroup)

RATUSAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH PPU IKUTI PELATIHAN DIGITAL CITIZENSHIP

PPU - Sebanyak 143 kepala sekolah dan guru di Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti sosialisasi digital citizenship. Kegiatan ini merupakan bagian dari hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang diperoleh Universitas Gunadarma yang dihadiri langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

Kegiatan digelar pada Jumat (3/11/2023) di Universitas Gunadarma bekerjasama dengan Pemkab PPU. Bertujuan untuk menyosialisasi modul pembelajaran interaktif dan konten kreatif dalam peningkatan sektor pendidikan daerah.

“Saya menaruh harapan besar agar Universitas Gunadarma dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di sekitar pada umumnya, dan lebih besar lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Makmur.

Program GNRM didanai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia. Tema besar yang diusung oleh Gunadarma adalah Integrasi Kewarganegaraan Digital dan Kreasi Generasi Alpha di Mayantara.

Adapun sosialisasi konten kreatif merupakan kelanjutan dari kegiatan survey evaluasi pembelajaran digital citizenship di beberapa SD dan SMP di PPU pada tanggal 10-13 Agustus 2023. Tim UG mendatangani secara langsung guru dan siswa di 5 sekolah yang dijadikan contoh penerapan model dan modul pembelajaran.

“Digital citizenship bagi siswa SD dan SMP yang tergolong generasi Alpha, yaitu anak-anak yang lahir di era digital,” sebutnya.

Makmur optimis kampus dapat menjadi pusat keunggulan yang membawa damnpak terhadap pembangunan masyarakat. Yakni melalui berbagai program pengabdian maupun penelitian.

“Harapannya adalah siswa tidak hanya belajar menggunakan teknologi tapi menjadi pengguna teknologi yang bijak di dunia digital. Pengetahuan kewargaan digital juga wajib dipahami para pendidik dan orangtua sehingga lingkungan pertama dalam membentuk anak dan siswa menjadi warga digital yang baik,” pungkasnya. (ADV/SBK)

RADAR IBUKOTA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat audiensi bersama Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tri Aris Wibowo Jumat sore (3/11/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

RENCANA BANGUN TPI, PEMKAB PPU AUDIENSI BERSAMA KEPELABUHAN PERIKANAN KKP

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Drs. Makmur Marbun melakukan audiensi bersama Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tri Aris Wibowo Jumat sore (3/11/2023). Berkaitan dengan rencana pengoptimalan fungsi beberapa pelabuhan yang ada di Benuo Taka.

Adapun sarana dan prasarana kepelabuhanan di PPU hingga kini belum memadai untuk meningkatkan produktivitas para nelayan. Hal itulah yang membuat Marbun terus mencari cara agar kebutuhan nelayan di Kabupaten PPU terpenuhi.

“Besar harapan Kami selaku masyarakat kabupaten Penajam paser utara dengan adanya pembangunan tempat pendaratan ikan lebih dari satu di PPU baik itu bantuan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Makmur juga mengungkapkan masih banyak nelayan di PPU menjual hasil tangkapnya di Kota Balikpapan. Karena tidak adanya TPI di PPU,maka perlu adanya pembangunan TPI di PPU.

“Kami mengajukan 4 pembangunan TPI ke pemerintah pusat, kami berharap minimal 2 pembangunan TPI segera di bangun di PPU demi peran strategis pembangunan perikanan Kabupaten PPU dalam pembangunan IKN,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, tinjauan langsung ke beberapa titik pelabuhan turut dilakukan. Juga mengunjungi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kelurahan Sesumpu dan Kelurahan Tanjung Tengah kecamatan Kecamatan Penajam, CV. Alas Logpond Kelurahan Waru, Desa Sesulu serta Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Desa Api-Api Kecamatan Waru.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP, Tri Aris Wibowo mengungkapkan PPU memang membutuhkan adanya pembangunan TPI. Namun lokasi pembangunannya masih perlu ditindaklanjuti lagi.

“Mengenai lokasi tempat yang akan dibangun TPI kami belum bisa memastikan. Terkait pembangunan Kami juga belum bisa memastikan kapan itu akan mulai dibangun karena harus melalui proses serta apakah tempat pembangunannya memenuhi syarat, namun kami memastikan pembangunan kampung modern ditahun 2024,” katanya.

Selain itu, persoalan kebutuhan dana juga masih menjadi persoalan. Meski begitu, wilayah PPU yang juga menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), memungkingkan adanya pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Namun ada dana APBN yang melalui kebijakan dua menteri, yang disebut dengan kampung modern/kampung nelayan maju mungkin melalui dana itu yang kami gunakan untuk membangun TPI di PPU,” pungkas Tri. (ADV/SBK)

KORAN **DIGITAL**

radar MEDIA

RADARKUKAR.COM

AKTUAL & TERPERCAYA

EDISI SENIN
6 NOV 2023

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DUKUNG PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN TERINTEGRAS

Potensi Ikan Melimpah, Warga Muara Muntai Sukses Ciptakan Berbagai Produk Olahan Ikan

Ilustrasi. Kawasan pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang (Istimewa)

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DUKUNG PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN TERINTEGRASI

TENGGARONG - Desa Bukit Pariaman dan Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, terpilih sebagai salah satu dari lima tempat pengembangan pertanian berbasis kawasan. Yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Pengembangan pertanian berbasis kawasan ini, juga dibangun dengan terintegrasi dengan beberapa sektor lain. Seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan.

Program pembangunan kawasan pertanian terintegrasi ini, dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, yang menggandeng akademisi Universitas Gajah Mada (UGM).

Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, mengaku dulunya Tenggarong Seberang merupakan lumbung pangan bagi Kukar. Tapi kejayaan mulai tergerus karena lokasi pertanian banyak bersinggungan dengan pertambangan batu bara.

“Jadi tinggal kita mengisikan dan mencari titik air yang menjadi kelemahan kita. Kalau kita bisa menemukan spot-spot air, nanti bisa kita kembalikan swasembada pangan di Kecamatan Tenggarong Seberang,” ujarnya.

Lanjut Tego, seluruh desa di Tenggarong Seberang memiliki lahan pertanian yang dipersiapkan untuk menjadi lokus pertanian terintegrasi. Bupati Kukar, Edi Damansyah, juga sering memberikan bantuan berupa unit traktor bagi kelompok tani untuk mematangkan lahan.

“Harapannya kita kolaborasi nanti, kalau berbicara pertanian kan tidak hanya lokasi menuju persawahan, jalan usaha tani juga sudah diperbaiki,” harap Tego Yuwono.

“Tidak hanya sawahnya yang kita benahi tapi infrastruktur menuju sawah juga kita perbaiki, peralatan juga sudah kita sediakan, pupuknya dan saprodi juga kita akan sediakan,” begitu tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Ilustrasi. Kawasan pertanian terintegrasi di Kecamatan Muara Kaman. (Istimewa)

Bagian Kawasan Pertanian Terintegrasi Kecamatan Muara Kaman Beri Dukungan Penuh

TENGGARONG - Menjadi bagian dari program pengembangan kawasan pertanian terintegrasi, yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM). Kecamatan Muara Kaman berikan dukungan penuh pada pengembangan program ini.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Camat Muara Kaman, Barliang. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, guna menyukseskan ambisi besar Pemkab Kukar sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan adalah, dengan mempersiapkan lahan pertanian dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pertanian. “Semua ini harus dikerjakan bersama-sama untuk menciptakan kawasan pertanian terintegrasi di Kukar,” ungkapnya, Sabtu (4/11/2023).

Diketahui, Pemkab Kukar menetapkan lima kawasan pertanian terintegrasi. Diantaranya Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman dan Marangkayu. Ia optimis, dengan dukungan dari berbagai pihak Kukar dapat menjadi lumbung pangan bagi Kaltim dan IKN.

“Kita akan manfaatkan sumber daya ini untuk mewujudkan visi luar biasa ini,” tambahnya.

Barliang juga berharap, dengan ditetapkannya Muara Kaman sebagai percontohan kawasan pertanian terintegrasi dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian petani yang ada.

“Semoga ini membawa dampak yang signifikan terhadap seluruh masyarakat Kecamatan Muara Kaman,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Suasana pelaksanaan kegiatan padat karya produktif yang digelar di Kelurahan Maluhu. (Istimewa)

Kegiatan Padat Karya Produktif yang Dilaksanakan Distransnaker Kukar Didukung Pihak Kecamatan

TENGGARONG- Kecamatan Tenggarong mendukung pelaksanaan kegiatan Padat Karya Produktif, yang digelar di Kelurahan Maluhu. Kegiatan yang menjadi bagian dari program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar) ini, dinilai sangat penting. Apalagi porgram itu berkaitan dengan penekanan angka inflasi di daerah.

"Kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran, termasuk membantu menekan angka kemiskinan," ujar Sekretaris Camat (Sekcam) Tenggarong, Syukur Eko Budi Santoso, Sabtu (4/11/2023).

Terdapat dua kegiatan di dalam Program Padat Karya Produktif ini. Pertama, pembuatan kandang kambing dan penyaluran bibit kambing. Kemudian yang kedua, pengerjaan normalisasi parit di RT 17 dan RT 18 Kelurahan Maluhu. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari, yang dimulai sejak Jumat (27/10/2023).

Melalui penyaluran bantuan kambing ini, diyakini dapat menjadikan kelompok ternak di Kelurahan Maluhu menjadi mandiri. Terutama, dalam mengembangkan sektor peternakan. "Seperti yang kita ketahui pasar kambing disini masih bagus, potensi ini harus dapat dimanfaatkan," tambahnya.

Sementara normalisasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga lingkungan. Apalagi parit dapat berperan sebagai pengendalian banjir.

"Jadi normalisasi kita ini tindakan untuk mencegah banjir. Apalagi sekarang mendekati musim hujan, tentunya program ini bagus untuk mengurangi resiko banjir," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i

Ilustrasi. Olahan ikan warga Kecamatan Muara Muntai. (Istimewa)

Potensi Ikan Melimpah, Warga Muara Muntai Sukses Ciptakan Berbagai Produk Olahan Ikan

TENGGARONG- Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memang dikenal sebagai wilyah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Salah satunya adalah sektor perikanan, sektor ini sejak lama menjadi tonggak perekonomian utama masyarakat Kukar.

Termasuk juga masyarakat di Kecamatan Muara Muntai, mereka bahkan berhasil mengolah hasil tangkapan ikan. Menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi dan memperoleh keuntungan dari hasil produk yang mereka buat.

Produk-produk ini juga sudah dipasarkan hingga luar daerah, seperti Jakarta dan Surabaya. Beberapa olahan ikan yang telah diproduksi masyarakat Muara Muntai adalah salai ikan, otak-otak, kerupuk, ikan asin dan juga olahan ikan lainnya.

Camat Muara Muntai, Mulyadi mengatakan sektor perikanan berkembang karena wilayah Muara Muntai berada di kawasan air sungai mahakam.

Warga fokus mengembangkan potensi ikan air tawar seperti patin, tomang, nila, ikan mas, ikan jelawat dan baung. Selain budidaya ikan, juga ada nelayan tangkap sungai atau danau yang menggunakan jaring dan mancing.

“Ada beberapa produk olahan ikan yang dilakukan oleh masyarakat dan sudah ada UMKM-nya. Salah satunya adalah membuat kerupuk, olahan amplang, abon. Kemudian ikan belida yang dibuat otak-otak,” terang Mulyadi, Sabtu (4/11/2023).

“Dengan adanya produk olahan ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa dijadikan produk unggulan di Kecamatan Muara Muntai,” lanjut Mulyadi.

Sebelum diolah menjadi produk, ikan-ikan tersebut hanya dijual dalam keadaan masih hidup, seperti ikan baung yang dijual senilai Rp30 ribu per kilogram. Tetapi, jika sedang musim ikan, maka harga-harga ikan akan anjlok drastis. Namun kini sudah berbeda, hasil olahan ikan saja bisa dijual warga dengan harga Rp 200-250 ribu per kilogramnya.

Mulyadi berharap dengan adanya potensi yang melimpah ini, bisa mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Ia bersyukur, selama ini sudah ada sejumlah bantuan dari pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), seperti perahu dan alat tangkap ikan.

“Kami juga sangat berharap dengan pemerintah kabupaten yang selama ini sudah melakukan pembinaan bantuan apapun itu, mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi supaya masyarakat kita betul-betul merasakan kesejahteraan. Karena dengan meningkatnya kesejahteraan itu otomatis ekonomi masyarakat akan meningkat,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

RADARKUKAR.COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Camat Sangasanga, Dachriansyah. (Istimewa)

Bersiap Hadapi IKN, Kecamatan Sangasanga Kembangkan Sektor Perikanan dan Peternakan

TENGGARONG - Jelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Kecamatan Sangasanga terus melakukan berbagi persiapan. Salah satunya adalah dengan fokus membangun sektor perikanan dan peternakan.

Camat Sangasanga, Dachriansyah, mengungkapkan langkah ini diambil lantaran ketersediaan pangan di Kukar belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat baru yang pindah ke IKN. Ini juga sejalan dengan target Pemkab Kukar yang gencar mengembangkan sektor pertanian. Untuk menjadi lumbung pangan bagi Kaltim dan IKN.

Meski Kecamatan Sangasanga didominasi oleh sektor industri, tapi mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan condong mengembangkan sektor perikanan. Kecamatan Sangasanga juga merupakan salah satu wilayah penghasil perikanan di Kukar, baik ikan tangkap maupun budidaya.

“Potensi ini sudah dikembangkan Pemkab Kukar melalui program bantuan 25 ribu nelayan produktif, di Sangasanga 90 persen sudah terealisasi. Kami percaya masyarakat kami sangat terbantu dengan program ini,” ucapnya, Kamis (2/11/2023).

Bahkan, Pemkab Kukar juga mulai mengembangkan perikanan keramba yang telah dirilis September 2023 lalu. Ini untuk memotivasi nelayan tangkap agar tidak ketergantungan pada tangkapan saja. “Upaya ini dilakukan agar mereka bisa mengembangkan peternakan ikan yang ada di Sangasanga, baik di sungai maupun kolam eks tambang,” kata Dachriansyah.

Tak hanya perikanan, ada juga potensi disektor lainnya. Seperti penggunaan eks tambang untuk peternakan sapi, seperti yang diterapkan perusahaan PT Ekualindo di Tenggarong Seberang. Kecamatan Sangasanga juga bertahap akan mulai merintis hal sama, dengan harapan seluruh bahan baku hewani Kaltim bisa terpenuhi oleh Kukar.

Menurut dia, pengembangan peternakan rencananya akan dilakukan di Kelurahan Sangasanga Muara, Sangasanga Dalam dan Pendingin. Kini tahap awal sudah dimulai dan rencananya akan ditindaklanjuti setelah 2025, dengan menjalin kerja sama bersama pihak swasta.

“Kami berharap potensi kita yang cukup besar ini bisa dibantu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam mengembangkannya. Sehingga bisa menjadi penyuplai ikan tawar di Kukar, Kaltim bahkan IKN, tidak lagi mendatangkannya dari luar daerah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

KORAN DIGITAL
RADAR BONTANG .COM
AKTUAL & TERPERCAYA
SENIN 6 NOVEMBER 2023

SPBN TANJUNG LIMAU SERING KEKURANGAN SOLAR, NELAYAN KELUHKAN KAPAL LUAR BONTANG

BACA HALAMAN A2

ALGAKA KAMPANYE DI BONTANG UTARA DITERTIBKAN

KANTOR REDAKSI: PERUMAHAN PESONA BUKIT SINTUK JL PUPUK RAYA, RT.50. BLOK F3 NO 23A
KELURAHAN BELIMBING, KECAMATAN BONTANG BARAT, KOTA BONTANG, KALIMANTAN TIMUR.

Salah satu kapal nelayan di TPI Tanjung Limau (Syakurah/Radarbontang)

SPBN Tanjung Limau Sering Kekurangan Solar, Nelayan Keluhkan Kapal Luar Bontang

BONTANG - Sejak lima tahun terakhir Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Tanjung Limau sudah sering didatangi oleh nelayan luar Bontang yang ikut menjual ikannya di sana.

Rifal, salah satu nelayan di sana mengungkapkan, bahwa hal itu sudah cukup lama terjadi. Kurang lebih terdapat 30 kapal dari Kabupaten Donggala yang sering menjual hasil lautnya di TPI Tanjung Limau.

Para nelayan tidak mempermasalahkan mereka yang ikut berjualan di sana, namun Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Limau tersebut, sering kekurangan karena kapal luar yang ikut mengisi di sana.

"Awalnya mereka bilang pakai pertalite, tapi ternyata isi solar juga di sini," jelasnya.

Hal ini menyebabkan antrian BBM bagi para nelayan, dan meminta pihak pemerintah maupun pihak terkait untuk mempertegas dalam menangani perizinan kapal yang datang dari luar Bontang.

"Sebenarnya kalau kapal luar memang harus memiliki izin, tapi nggak ngerti juga bagaimana," ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

KORAN DIGITAL RADARBONTANG.COM AKTUAL & TERPERCAYA Tahun I

Kadiskes Bontang, drg Toetoek bersama pegawai pensiun dan mutasi. (Yusva Alam)

Direktur: [illegible] Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: M Abduh Kudsi
Reporter: Yusva Alam (kooridnator), Nur Yahya, Iqlima Syih Syakurah **Kantor Redaksi:** Perum Pesona Bukit Sintuk Jl Pupuk Raya, RT.50. Blok F3 No 23A Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

RADARBONTANG.com dikelola oleh **PT RADAR MEDIA MEGATAMA,** dengan aktivitas Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.

Penertiban algaka kampanye di wilayah Bontang Utara. (ist)

Algaka Kampanye di Bontang Utara Ditertibkan

BONTANG - Tim gabungan dari Polsek Bontang Utara, Panwascam Bontang Utara, dan Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye (ALGAKA) yang tersebar di wilayah Kecamatan Bontang Utara pada Kamis (2/11/2023) pagi.

Penertiban dilakukan di sepanjang jalan Kelurahan Guntung, Loktuan, Bontang Baru, hingga Kelurahan Bontang Kuala.

Kapolsek Bontang Utara Iptu Lukito mengatakan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Bawaslu Kota Bontang dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengharuskan seluruh ALGAKA diturunkan paling lambat tanggal 30 Oktober 2023.

"Mereka (Partai Politik Peserta Pemilu) sudah diberi kesempatan untuk menurunkan ALGAKA masing-masing," ungkapnya mengutip dari Polresbontang.com.

Pada penertiban tersebut, petugas menurunkan berbagai jenis ALGAKA, mulai dari spanduk, baliho, hingga Banner.

"Total 122 ALGAKA yang telah ditertibkan," ujar Iptu Lukito.

"Kami dari pihak kepolisian hanya melakukan pendampingan, agar kegiatan tersebut berlangsung aman dan kondusif," terangnya.

Editor: Yusva Alam

Pelayanan pendaftaran sebelum ruang poli klinik saraf RSUD Bontang. (Yahya Yabo)

Mengenal Klinik Saraf RSUD Bontang, Tangani Pasien dengan Alat Terbaru

BONTANG – Klinik Saraf atau Neurologi di RSUD Taman Husada Kota Bontang memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada saraf seperti stroke, nyeri, sakit kepala vertigo hingga gangguan gerak pada wajah, tangan, maupun kaki.

Dokter Spesialis Saraf atau Neurologi, dr Atika Ridwan, Sp.N menjelaskan, bahwa klinik spesialis saraf melakukan perawatan pada penyakit saraf. Di mana penyakit saraf yakni segala jenis gangguan pada sistem saraf manusia mulai dari ujung kaki hingga ke otak. Seluruh tubuh manusia terdiri dari sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat.

"Sistem saraf tepi yang membuat manusia dapat mengenali rasa sakit, dingin, panas, geli, gatal, keram, kesempatan dan lainnya. Sedangkan sistem saraf pusat yang membuat manusia dapat bergerak, berpikir, mengingat, emosi, melihat, mendengar, mencium bau, bahkan tidur pun diatur oleh sistem saraf," jelas dr Atika saat dikonfirmasi.

Selanjutnya, Ia mengatakan alur pelayanan pasien saraf sama seperti pasien lainnya yakni dimulai dari pendaftaran, skrining pasien rawat jalan apakah pasien mendapat pelayanan prioritas bagi pasien lanjut usia. Selain itu, klinik saraf juga melakukan pemeriksaan pasien dan MCU.

"Setelah pasien diperiksa akan diarahkan ke laboratorium atau radiologi. Bila ada pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan dan bila telah selesai menerima pelayanan di klinik saraf, pasien bisa langsung menuju apotek untuk menunggu penyerahan obat," lanjutnya.

Dr Atika mengatakan, klinik saraf telah beroperasi sejak tahun 2008. Saat ini memiliki dua dokter spesialis saraf atau neurologi. "Ada saya dan dr Shinta Fithri Azis Sp.N sebagai dokter spesialis saraf di klinik saraf RSUD Bontang," ungkapnya.

Sementara kelebihan klinik saraf RSUD Bontang sendiri yang dimiliki yakni, saat ini memberikan pelayanan pemeriksaan fungsi saraf secara umum, pemeriksaan EEG (Electroencefalografi), pemeriksaan fungsi kognitif untuk pasien maupun untuk MCU, penanganan nyeri dengan pemasangan tapping/plester terapi atau dengan injeksi/penyuntikan pada lokasi nyeri.

Selain memiliki alat-alat terbaru, saat ini alat yang ada adalah pemeriksaan EEG untuk melihat gelombang otak dan pemeriksaan kognitif dengan komputerisasi untuk mengetahui fungsi otak pada gangguan memori.

"Insya Allah akhir tahun ini juga akan segera melayani pemeriksaan EMG (ElectroMyoGrafi) untuk pemeriksaan saraf tepi dan tahun depan Insya Allah ada alat baru yang akan melengkapi klinik saraf yaitu TMS (Trans Magnetik Stimulasi) untuk melatih fungsi otak yang terganggu dengan gelombang magnet yang biasanya digunakan untuk pasien stroke, depresi, insomnia, bahkan untuk nyeri," terang dr Atika.

Ia juga mengharapkan klinik saraf RSUD Bontang tetap bisa melayani masyarakat dari semua pasien mulai dari pasien umum dan BPJS.

"Ya klinik saraf melayani pasien umum, BPJS, maupun asuransi lainnya yang bekerja sama dengan RSUD Taman Husada. 80 persen pasien yang kami layani adalah pasien BPJS," urainya.

"Harapan kami agar klinik saraf dapat berkembang lebih jauh lagi dengan alat yang lebih canggih dan SDM yang lebih terlatih untuk membantu kesembuhan pasien dengan gangguan saraf khususnya di Kota Bontang. Saat ini penanganan ilmu penyakit Neurologi sudah berkembang sangat pesat utamanya dalam pelayanan penyakit stroke," pungkasnya. (adv/yah)

Ilustrasi aksi perundungan. (ist)

Pemkot Diminta Segera Ambil Tindakan Cegah Perundungan

BONTANG - Kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja belakangan ini menjadi isu yang sangat marak, sehingga mempengaruhi psikis seseorang.

Ridwan, Anggota Komisi II DPRD Bontang memberikan salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau mengucilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal ini, maka teman yang dijauhi akan merasa sedih, tertekan, membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan berdampak pada mental seseorang.

"Ini termasuk dengan tindakan yang agresif, yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lemah," ucapnya saat dihubungi, Jumat (03/11/2023).

Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

"Faktor ini terjadi bisa dari keluarganya, sekolah, teman-teman lingkungannya, atau teman bermainnya sekumpulan, dan juga dari handphone," bebernya.

Perundungan bisa terjadi sama siapa saja, kapan saja, bahkan dimana saja tanpa terkecuali. Dari perundungan ini bisa membuat anak untuk mudah mengalami stres. Kedepannya juga bisa saja anak menjadi lemah dan kurangnya percaya diri.

"Untuk di lingkungan sekolah terutama yang banyak kasusnya, guru lebih bisa membandingkan lagi yang mana para murid bercanda, dan yang mana juga murid membully," ungkapnya.

Ridwan juga menambahkan, pemerintah harus cepat mengambil tindakan, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan luar. Apalagi jika sudah ada korban yang sampai bunuh diri, pastinya yang dialami anak atau seorang sudah sangat fatal terhadap teman, lingkungan, atau sebagainya. (dwi/adv).

KORAN DIGITAL RADARBONTANG.COM AKTUAL & TERPERCAYA

Najirah, Wakil Wali Kota Bontang saat melihat beberapa motor contest Bontang. (dwi).

70 Peserta Bersaing di Kontes Modifikasi Mobil dan Motor

BONTANG - Kegiatan meet up sekaligus contest modifikasi mobil dan motor yang diselenggarakan oleh pengurus Cabang Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bontang, berlangsung di Halaman Parkir Bontang Citimall, Sabtu (04/11/2023).

Melalui kegiatan ini, memiliki wadah yang sangat baik untuk mengembangkan bakat dan minat dalam dunia otomotif. Organisasi ini juga membantu untuk terus belajar, bertukar pengalaman, serta meningkatkan pengetahuan terkait modifikasi kendaraan.

Najirah, Wakil Wali Kota Bontang menyampaikan, Ini adalah salah satu bukti bahwa Bontang memiliki potensi besar dalam industri otomotif dan modifikasi. Kegiatan ini juga menjadi salah satu kegiatan yang sangat positif, terutama untuk anak muda Kota Bontang.

"Acara seperti ini memang sangat penting dalam mempererat tali silaturahmi, dan juga memajukan industri modifikasi otomotif di Kota Bontang," ucapnya.

Modifikasi kendaraan merupakan salah satu bentuk ekspresi dari para pencinta otomotif, dan di Kota Bontang otomotif telah banyak penggemarnya. Kreativitas yang telah ditunjukkan oleh para peserta Auto Contest Club Bontang dalam memodifikasi kendaraan mereka.

"Saya berharap, IMI cabang Bontang akan terus berkembang dan menjadi wadah yang semakin kuat bagi para pencinta otomotif," paparnya.

Acara seperti ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk mempromosikan keselamatan berlalu lintas. Kita semua tahu betapa pentingnya keselamatan dalam berkendara, terlebih lagi ketika kita memiliki kendaraan yang telah dimodifikasi.

"Saya ingin mengingatkan kepada semua peserta dan pengunjung untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keselamatan diri dan juga orang lain, serta menjaga ketertiban dalam berkendara," ungkapnya.

Dana Saputra, Ketua Panitia menjelaskan, bahwa kegiatan contest ini berlangsung selama dua hari. Lomba tersebut dinilai dari 3 sektor, dan setiap penilaian pun berbeda-beda.

"Untuk peserta ada 70, yang mobil 16 peserta dan sisanya motor. Pengumuman juara pun malam ini, besoknya baru kegiatan foto contest," bebernya.

Saputra juga berharap bisa memberikan nilai positif pada masyarakat, bahwa sebuah komunitas itu bukan yang dipandang negatif, bisa memberi nilai kreatif anak muda Bontang, serta bisa lebih maju.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Ilustrasi obat-obatan terlarang. (ist)

Cegah Maraknya Narkoba, Legislatif Imbau Pemkot Galakkan Penyuluhan

BONTANG - Melihat maraknya masyarakat Kota Bontang yang telah terjerat dalam kasus narkoba, Anggota DPRD Kota Bontang, Ridwan mengimbau kepada pemerintah kota (Pemkot) agar sering mengadakan penyuluhan ke masyarakat.

Hal itu diharapkan, menjadi upaya pencegahan rentannya seorang terpengaruh menggunakan barang haram tersebut. Karena menggunakan obat-obatan terlarang sangat mempengaruhi kinerja seseorang, apalagi untuk anak usia di bawah umur yang masih menduduki bangku sekolah.

"Ini menjadi suatu perhatian buat kita semua, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Ini juga termasuk akibat pergaulan di lingkungan. Orang tua pun harus benar-benar menjaga anak-anaknya," paparnya saat diwawancarai, Kamis (02/11/2023).

Menurutnya, walaupun tes urine dilakukan, akan sia-sia tanpa adanya penyuluhan. Dengan maraknya masyarakat para pengguna ataupun pengedar, seharusnya pemkot sigap mengambil pergerakan untuk mengadakan penyuluhan rutin, baik dari dinas yang terkait, contohnya penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Menurut saya, percuma jika diadakan hanya tes urine saja, tanpa adanya penyuluhan. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah pencegahan, bagaimana cara agar jangan sampai menggunakan narkoba, dari asal mula penyuluhan itu," ungkapnya.

Ridwan juga berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bontang, agar dapat memperkuat agama. Karena agama ialah yang paling utama untuk kembali ke diri masing-masing, serta lingkungan luar di sekeliling kita yang dapat membuat baik buruknya kita semua, jika bisa membentengi diri maka akan terhindar dari narkoba. (dwi/adv).

KORAN **DIGITAL**

radar MEDIA

RADAR BERAU .COM

AKTUAL & TERPERCAYA

EDISI SENIN
6 NOV 2023

PEMBOIKOTAN BUKAN SATU-SATUNYA SOLUSI UNTUK BELA PALESTINA

A

TKA DI BERAU HARUS TAAT ADMINISTRASI

RADAR BERAU .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

PEMBOIKOTAN BUKAN SATU-SATUNYA SOLUSI UNTUK BELA PALESTINA

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu Aliansi Berau Pedulu Palestina melalukan aksi yang menyuarakan tentang pemboikotan beberapa produk yang berafiliasi dengan Israel maupun Amerika.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menuturkan, pemboikotan bukan satu-satunya jalan untuk mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga harus ada pertimbangan terlebih dahulu.

“Karena dengan pemboikotan produk ini tentunya akan berimbas kepada pekerja di perusahaan tersebut. Kita harus memikirkan hal lain selain boikot suatu produk,” ungkapnya.

Lanjut Madri, sebaiknya masalah yang terjadi di Kabupaten Berau terlebih dahulu diselesaikan sebelum melakukan hal lebih besar untuk negara lain. Karena saat ini, dinilainya banyak hal yang memerlukan perhatian.

“Saya pribadi tetap mendukung dan bersimpati terhadap apa yang dirasakan Palestina, tapi jangan sampai pemboikotan justru menyengsarakan rakyat kita sendiri. Semoga ada jalan tengah dan solusi yang lebih bijak bisa kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita di Palestina,” pungkasnya. (adv/set)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

TKA DI BERAU HARUS TAAT ADMINISTRASI

TANJUNG REDEB - Pemerintah diminta jajaran legislatif untuk melakukan pengawasan dan menginventarisasi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Kabupaten Berau.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menuturkan, inventarisasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui para TKA memenuhi persyaratan atau tidak.

“Apalagi sudah ada aturan dan undang-undang untuk tidak dilanggar. Jika ada TKA tidak taat administrasi, harus ditindak tegas. Jika perlu dideportasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, TKA yang masuk ke Bumi Batiwakkal harus mengantongi legalitas yang jelas. Jangan sampai, kata Syarifatul, ada izin berwisata tetapi digunakan untuk bekerja.

“Peraturan ini berlaku sama di luar negeri, jadi kita juga harus tegas,” ujarnya.

Politikus Golkar ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya humanis, jika menemukan TKA yang melakukan pelanggaran.

“Jika fatal, bisa saja langsung dideportasi. Jangan anggap sepele permasalahan administrasi,” pungkasnya. (adv/set)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

ASET DAERAH JANGAN TERBENGKALAI

TANJUNG REDEB - Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terhadap aset daerah menjadi sorotan legislatif. Sebab, masih banyak aset daerah yang belum terakomodir.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto menuturkan, pihaknya sudah pernah membeberi masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperhatikan aset daerah yang terbengkalai agar dapat digunakan secara maksimal.

“Supaya semua aset daerah diperhatikan dan dikelola secara baik agar terus berjalan,” ujarnya.

Dirinya mengaku akan berkoordinasi kepada OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui jika nantinya terdapat masalah anggaran atau hal yang lain, maka akan didiskusikan lebih lanjut.

“Jika masalahnya di anggaran, nanti untuk kendalanya akan dianggarkan pada tahun 2024 supaya aset daerah ini juga bisa berjalan,” jelasnya.

Subroto berharap nantinya anggaran yang digunakan dapat memaksimalkan aset daerah dan dapat dirawat sehingga bisa bertahan lebih lama.

“Soalnya aset daerah ini juga akan menambahkan PAD kita dan kembali kepada kita juga,” tandasnya. (adv/set)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman saat berada di stan Berau EXPO.

SEKRETARIAT DPRD BERAU TAMPILKAN PRODUK HINGGA CAPAIAN DI PAGELARAN EXPO

TANJUNG REDEB - Sekretariat DPRD Berau turut memeriahkan puncak rangkaian hari jadi Kabupaten Berau dan Kora Tanjung Redeb yang dikemas dalam pagelaran Berau EXPO.

Diketahui, dalam pagelaran Berau EXPO 2023, DPRD Berau menampilkan beberapa produk berupa kebijakan atau Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan.

"Jadi di stan kami mengenalkan kegiatan-kegiatan DPRD Berau. Selain itu ada juga foto-foto anggota DPRD, agar masyarakat mengenal wakil mereka," ungkap Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman.

Dia menambahkan, beberapa piagam dan capaian kerja DPRD juga turut dipajang. Tak hanya itu, berbagai kegiatan DPRD Kabupaten Berau juga ikut ditampilkan secara visual.

"Seperti saat pelaksanaan persidangan, peninjauan dan reses. Dan ini sebagai bentuk bahwa lembaga DPRD Berau mendukung semua program pemerintah, termasuk mengikuti Berau Expo," katanya.

"Kegiatan ini ada penilaiannya. Tentunya kami berusaha semaksimal mungkin dalam keikut sertaan, dengan menampilkan yang terbaik," tandasnya. (adv/set)

RADAR BERAU .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

AGAR WISATAWAN KEMBALI, DORONG ADANYA PEMBENAHAN

TANJUNG REDEB - Menjelang libur akhir tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau didorong untuk berbenah. Sebab, banyak wisatawan yang akan berkunjung.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah menuturkan, pembenahan yang dilakukan adalah memperbaiki fasilitas penunjang, agar wisatawan yang datang dapat nyaman.

"Supaya para wisatawan yang datang juga tidak jera untuk kembali. Apalagi sektor pariwisata ini bermanfaat untuk PAD," katanya.

Menurutnya, jika pembenahan tidak dilakukan sejak dini, besar kemungkinan pariwisata yang dimiliki Berau dapat ketinggalan dengan daerah lain.

"Apa yang dimiliki Berau, tidak dimiliki daerah lain di Kaltim. Ini kesempatan bagus. Namun jika OPD tidak berbenah, maka sia-sia saja," tegasnya.

Dirinya menyebut, setiap tahunnya, ada ribuan wisatawan. Baik domestik maupun mancanegara. Namun jika tidak ada pembaharuan, dirinya menyakini, Berau akan dilupakan.

"Jika ingin seperti Bali, Jogjakarta, harus berani berubah. Jangan jalan ditempat saja," imbuhnya.

Dirinya juga mendorong pemerintah untuk menggandeng pihak swasta, demi kemajuan pariwisata Berau. Jika hanya mengandalkan OPD terkait, Andi Amir yakin pariwisata Berau hanya jalan di tempat.

"Sebagai contoh. Saya ke Derawan, dan dari tahun ke tahun begitu saja. Apakah saya merasa ada yang spesial lagi. Tentu tidak. Makanya saya tekankan untuk ada perubahan," pungkasnya. (adv/set)

KORAN **DIGITAL**

radar MEDIA

RADAR **BALIKPAPAN**.COM

AKTUAL & TERPERCAYA

EDISI SENIN
6 NOV 2023

PERTAMINA LUBRICANTS SEMAKIN BERSAING DAN MENANGKAN PASAR MELALUI PENERAPAN SNI

DISHUB BALIKPAPAN SIAPKAN BUS RAYA TERPADU SAMBUT IKN

RADAR BALIKPAPAN .COM AKTUAL & TERPERCAYA

Pertamina Lubricants pengelola bisnis pelumas dan specialties chemicals terus mengupayakan untuk meningkatkan kapabilitasnya dan menghadirkan produk berkelas dunia.

PERTAMINA LUBRICANTS SEMAKIN BERSAING DAN MENANGKAN PASAR MELALUI PENERAPAN SNI

BALIKPAPAN - Industri pelumas di Indonesia merupakan industri yang sangat kompetitif baik persaingan dengan merek-merek domestik maupun global. Persaingan pasar ini merupakan tantangan yang menjadikan Pertamina Lubricants terus berbenah dan mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

Pertamina Lubricants, anak Perusahaan Subholding Commercial & Trading Pertamina yang mengelola bisnis pelumas dan specialties chemicals terus mengupayakan untuk meningkatkan kapabilitasnya dan menghadirkan produk berkelas dunia sekaligus terus berupaya untuk meningkatkan daya saing agar semakin adaptif, inovatif dan agile dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Industri pelumas nasional sendiri mencatat perkembangan yang luar biasa. Tingginya penjualan kendaraan bermotor menjadi ceruk pasar yang menjanjikan bagi produsen pelumas. Tak hanya itu, meningkatnya kegiatan industri pasca pandemi COVID-19 memberikan kebutuhan atas pelumas industri yang menjanjikan.

Salah satu langkah kongkrit dalam memastikan hal ini adalah dengan secara aktif menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada seluruh produk pelumasnya dan standardisasi sistem manajemen SNI/ISO Series pada proses bisnisnya mulai dari lini produksi, distribusi hingga pemasaran.

Untuk memenuhi regulasi wajib yang ditetapkan Pemerintah, memberikan jaminan kualitas dan kepuasan bagi konsumen serta meningkatkan daya saing Perusahaan, Pertamina Lubricants memiliki roadmap penerapan dan implementasi standardisasi yang dimulai sejak pertama

Lanjutan Pertamina

berdiri di tahun 2013.

Saat ini, Pertamina Lubricants sudah menerapkan 8 SNI/ISO secara terintegrasi mulai dari Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Energi hingga Sistem Manajemen Aset.

Pertamina Lubricants juga sudah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2017 untuk Sistem Manajemen Mutu Laboratorium di berbagai area pabrik dan laboratorium uji pelumas di seluruh Indonesia.

Salah satu standardisasi yang unik untuk industri pelumas dan sudah dikantongi oleh Pertamina Lubricants adalah IATF 16949:2016, yakni standar yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) atau Quality Management System (QMS) khusus di sektor otomotif. Standar ini dikembangkan oleh organisasi otomotif dunia yakni International Automotive Task Force (IATF).

“Sebagai perusahaan pelumas kebanggaan Indonesia, Pertamina Lubricants mendukung penuh penerapan standardisasi produk dan penggunaan produk bersertifikat SNI. Ini merupakan komitmen untuk secara konsisten memberikan produk dengan kualitas terbaik dan berkelas dunia untuk konsumen Indonesia. Penerapan SNI juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan secara jangka panjang akan meningkatkan competitive advantage kami dalam persaingan global,” ujar Intania Prionggo, Manager PR & Support Pertamina Lubricants Sabtu (4/11/2023)

Saat ini, Pertamina Lubricants terus mendaftarkan produk-produknya ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung untuk memperoleh SPPT SNI (Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI) dimana perusahaan berhak untuk mencantumkan logo SNI (Standar Nasional Indonesia) pada setiap kemasan produknya.

Sampai saat ini, Pertamina Lubricants telah proaktif mensertifikasikan SNI pada produk pelumas unggulannya sejak tahun 2013. Pertamina Lubricants sudah mengantongi 100 sertifikasi SNI untuk berbagai varian produk pelumas di segmen otomotif dan industri termasuk Fastron, Prima XP, Enduro 4T, Meditran SX dan Turalik dan masih banyak lagi.

“Komitmen Pertamina Lubricants terhadap SNI sudah tidak perlu diragukan lagi. Kami melihat SNI sebagai salah satu pilar penting dalam upaya kami untuk memperkuat daya saing produk pelumas Pertamina, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan berpegang teguh pada standar SNI, kami tidak hanya memastikan kualitas produk, tetapi juga membangun kepercayaan Masyarakat,” jelasnya.

Dimintai tanggapannya terkait komitmen PT Pertamina Lubricant dalam menerapkan SNI, secara terpisah Pranata Humas Ahli Madya Badan Standardisasi Nasional (BSN), Denny Wahyudhi mengatakan, komitmen PT Pertamina Lubricants dalam menerapkan SNI dibuktikan dengan diraihnya SNI Award.

“Pertamina Lubricants sudah mendapatkan 7 Predikat Gold dan 3 Predikat Platinum dalam SNI Awards, penghargaan tertinggi dari Pemerintah Indonesia serta manjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya yang diselenggarakan oleh BSN,” tambah Denny.

Dengan makin banyaknya perusahaan menerapkan SNI termasuk PT Pertamina Lubricants, diharapkan masyarakat dapat terlindungi, kepercayaan publik meningkat, serta dapat meningkatkan daya saing produk baik nasional maupun global.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

RADAR BALIKPAPAN .COM AKTUAL & TERPERCAYA

Jalan Jenderal Sudirman di malam hari. ANTARA/novi abdi

DISHUB BALIKPAPAN SIAPKAN BUS RAYA TERPADU SAMBUT IKN

BALIKPAPAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan menyiapkan pengembangan moda transportasi bus raya terpadu (BRT) guna menyambut kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai 2024.

“Seiring pembangunan IKN dengan konsep smart city, Balikpapan sebagai kota penyangga harus menyesuaikan,” kata kepala Dishub Balikpapan Adward Sekenda Putra, di Balikpapan, Sabtu (4/11/2023).

Kota Balikpapan, menurut Adward, tidak bisa hanya mengandalkan angkutan kota dan transportasi daring yang saat ini sudah ada.

Dishub Balikpapan merujuk pada BRT seperti di Jakarta, yaitu TransJakarta, sehingga mampu menampung penumpang dalam jumlah banyak dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Koridor utamanya adalah Jalan Jendral Sudirman yang terletak di pusat Kota Balikpapan. Kami kembangkan (BRT) agar tidak terlalu banyak kendaraan pribadi,” katanya.

Setelah koridor utama di Jalan Jendral Sudirman, Dishub Balikpapan juga akan mengembangkan koridor lain seperti di wilayah Timur, Utara, Selatam, dan Barat Kota Balikpapan.

“Kami sudah punya perencanaan utama untuk mewujudkan keinginan angkutan massal tersebut. Kami juga sudah meminta dukungan ke Kementerian Perrhubungan untuk pengadaan bus,” ujarnya.

Adward berharap masyarakat Balikpapan akan terbiasa dengan angkutan massal, terutama BRT, pada 2024. Sedangkan angkutan kota akan menjadi layanan pengumpan (feeder) dari jalur yang tidak dijangkau BRT.

Namun saat ini, Dishub Balikpapan masih perlu melakukan penindakan terhadap sopir-sopir tanpa izin atau sopir tembak. (Ant/MK)

Pewarta : Novi Abdi
Editor : Ahmad Buchori

Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah saat menghadiri HUT ke-4 Partai Gelora di Kota Balikpapan.

ANIS MATA : KEMERDEKAAN PALESTINA AGENDA UTAMA PARTAI GELORA

BALIKPAPAN - Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menghadiri langsung HUT ke-4 Partai Gelora di Kota Balikpapan yang dipusatkan di halaman Balikpapan Sport Convention Center (BSCC) Dome, pada Minggu (5/11/2023).

Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata dalam orasinya mengatakan, hingga hari ini sudah lebih dari 10 ribu orang yang mati syahid di Palestina. “Dan kota Gaza sudah seperti kota mati, tidak ada air, tidak ada listrik,” ujarnya.

Lebih lanjut Anies Mata menjelaskan, maka dari itu dirinya merasa kebahagiaan hari jadi Partai Gelora yang ke-4 ini tidak sempurna mengingat masih ada duka di Palestina.

“Maka perayaan hari jadi ini kami sertakan juga aksi solidaritas, mudahan seluruh nyawa yang sudah syahid menjadi tanda Palestina akan menjadi negara merdeka,” jelasnya.

Dikatakan Anies, kemerdekaan Palestina merupakan agenda utama dari Partai Gelora. Mengingat di negara tersebut terdapat kiblat pertama umat Islam.

“Dan ini juga amanat UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 yaitu kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa, maka wajib memberi dukungan atas kemerdekaan rakyat Palestina,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan, agenda ini di pilih di Kota Minyak ini tidak terlepas dari efek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Kami memilih Balikpapan karena kota ini bakal menjadi kota terpenting di Indonesia, maka kami ingin merayakannya,” ujarnya.

Menurutnya, Kota Balikpapan ke depannya bakal menjadi mercusuar baru Indonesia, segala macam informasi akan bermuara dari Kota Balikpapan. “Lebih lagi, dalam waktu dekat agenda upacara 17 Agustus 2024 bakal di gelar di IKN,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Fahri Hamzah mengingatkan untuk memilih pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara super power agar bisa mewujudkan perdamaian dunia.

“Saat ini masih banyak saudara di Palestina yang terjajah oleh Israel, maka Indonesia harus punya militer yang kuat, rakyat cerdas, ekonomi kuat agar secara real bisa bebaskan Palestina,” tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

Ketua Pansus Raperda Trantibumlinmas DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid saat memaparkan Raperda Trantibumlinmas.

DPRD KALTIM GELAR UJI PUBLIK RAPERDA TRANTIBUMLINMAS

BALIKPAPAN - DPRD Kaltim menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) pada Minggu (5/11/2023).

Ketua DPRD Kaltim, Hassanudin Mas'ud mengatakan, pembuatan Raperda Trantibumlinmas ini merupakan salah satu perintah Undang-Undang (UU). Di mana pada uji publik tersebut dibawakan tiga narasumber, yaitu Ketua Pansus Raperda Trantibumlinmas DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid, Kepala Satpol PP Kaltim, AFF Sembiring dan Perwakilan Direktorat Pol PP Linmas, Irwan Setiawan.

Materi pertama disampaikan, Irwan Setiawan dengan tema, "Urgensi Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Pemerintah Daerah". Begitu juga dengan materi yang dibawakan AFF Sembiring, "Penerapan Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Peran Penegakan Peraturan Daerah Serta Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur: Tantangan dan Hambatan".

Sementara Harun Al Rasyid menyampaikan materi mengenai Ruang Lingkup Ranperda Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat".

"Untuk implementasi UU ini di daerah ini kita belum punya komponen itu, maka kita buat perda hari ini," ujarnya.

Ia mengatakan uji publik ini untuk menggodok perda tersebut agar semua elemen masyarakat bisa terserap.

"Mudah-mudahan kalau ini jadi, maka perda ini bisa dilaksanakan sesuai amanah perintah UU," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menambahkan perda ini sebagai payung hukum Trantibumlinmas yang sebelumnya sudah ada di Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26/2020 dijalankan.

"Tapi karena kita tidak punya, maka kita harus buat payung hukum yang jelas. Supaya apa? supaya teman-teman Satpol PP di lapangan juga punya kepastiannya pada saat mereka melakukan peningkatan dan segala macamnya, sehingga mereka sudah ada aturan-aturan yang melindungi mereka," tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar. MEDIA

RADAR **SAMARINDA**.COM

AKTUAL & TERPERCAYA

EDISI SENIN
6 NOV 2023

YUK, IKUTAN PEMILIHAN PUTRI INDONESIA KALTIM 2024, DAFTARKAN DIRIMU SEKARANG !

BAWASLU SAMARINDA TERTIBKAN ALGAKA YANG MENYALAHI ATURAN

RADAR SAMARINDA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Sesi konferensi pers Pemilihan Putri putri Indonesia kalimantan Timur di Ibis Hotel Samarinda, Minggu (5/11/2023).

YUK, IKUTAN PEMILIHAN PUTRI INDONESIA KALTIM 2024, DAFTARKAN DIRIMU SEKARANG !

SAMARINDA - Ajang Pemilihan Puteri Indonesia Kalimantan Timur kembali digelar untuk edisi tahun 2024 mendatang.

Deskape Management selaku Licence Holder bersama Yayasan Putri Indonesia dan Ibis Hotel telah dipercaya selama dua edisi terakhir untuk melaksanakan ajang ini di Kaltim.

“Secara nasional Pemilihan Putri Indonesia akan digelar Maret 2024. Nah, Desember ini pemilihan untuk Putri Indonesia Kalimantan Timur sudah harus digelar untuk memilih perwakilannya,” terang Direktur Deskape Managent, Dewa Srikaton Putra yang dipercaya sebagai penyelenggara event selama 5 tahun.

Kembali ditekankan bahwa ajang ini tidak hanya soal berparas ayu tetapi juga mempunyai wawasan luas, kepribadian yang baik dan menjadi inspirasi perempuan Kaltim lainnya

“Dengan platform ini menjadi wadah representatif yang unggul secara beauty, brain dan behavior juga berkarakter dan berbudi luhur dan punya peran aktif di masyarakat, “ terangnya.

Khusus Kaltim, diinformasikan pendaftaran akan dibuka mulai 6 November - 1 Desember 2023.

Di ajang Pemilihan Putri Indonesia Kalimantan 2023 lalu, tercatat ada sebanyak Sebelumnya, 130 pendaftar. Setelah melalui proses seleksi, ditetapkan 15 orang yang memenuhi syarat untuk melaju ke tahap berikutnya.

Dijelaskan, setelah proses pendaftaran maka peserta akan mengikuti tahapan seleksi setelah memenuhi kualifikasi serta lolos administrasi. Kemudian mengikuti tahapan pra dan karantina hingga akhirnya nanti menuju malam puncak penobatan pada 23 Desember 2024 nanti.

Sebagai gambaran, item persyaratan pendaftarannya meliputi, WNI 18-26 tahun, belum menikah, tinggi badan minimal 170 cm, domisili atau punya garis keturunan di Kaltim, punya pengetahuan umum, wawasan luas pariwisata dan kebudayaan serta lingkungan hidup.

Selain itu, peserta harus berpenampilan dan berkepribadian menarik serta cerdas.

Tak kalah penting, lanjut dia, syaratnya harus mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris. Jika memiliki keahlian di suatu bidang, juga dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian.

Dari sisi performance, peserta wajib punya kepercayaan diri yang tinggi. Rata-rata calon peserta Putri Indonesia selalu memiliki basic modeling atau yang berkenaan dengan modeling dan skill public speaking.

“Selalu begitu, background fashion, atau modeling atau skill speaker sangat memengaruhi performance mereka pada saat putaran final nanti. Di samping tentu saja penguasaan khusus pada bahasa asing utama Bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional,” papar Dewa.

Meski diakuinya juga, pengalaman pada perhelatan sebelumnya ada juga beberapa pendaftar yang belum terbekali dengan cara berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Untuk itulah pada edisi ini akan ada uji kompetensi pada semua bidang. Termasuk bagaimana berbahasa yang baik dan benar baik bahasa asing dan utamanya bahasa Indonesia,” pungkasnya. (Rls/rs1)

Pewarta : Adhi Abdhian
Editor : Nicha Ratnasari

Penertiban Algaka di Kecamatan Samarinda Kota

BAWASLU SAMARINDA TERTIBKAN ALGAKA YANG MENYALAHI ATURAN

SAMARINDA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) menggelar penertiban alat peraga kampanye (Algaka) yang memenuhi Kota Tepian, pada Sabtu (4/11/2023).

Penertiban tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perwali Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame.

Kegiatan penertiban ini dilaksanakan serentak di 10 kecamatan se-Kota Samarinda dan dilakukan oleh tim gabungan dari masing-masing kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Samarinda Kota.

Tim dalam giat gabungan penertiban algaka ini terdiri dari Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota, Panwaslucam, Satpol PP, Polsek, dan Babinsa. Diawali dengan apel di Kantor Kecamatan Samarinda Kota, yang dipimpin oleh Camat Samarinda Kota, Anis Siswantini.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslucam Samarinda Kota, Signa Prakuswa Putera, menerangkan bahwa barang yang diamankan selama penertiban berupa poster, spanduk, hingga reklame, yang melanggar regulasi.

“Sesuai instruksi Bawaslu, PKPU, dan Perda Samarinda terkait alat peraga yang dipasang diluar jadwal kampanye, yang mengandung unsur mengajak, maka kami turunkan,” ujar Signa

Lebih lanjut, Signa menjelaskan bahwa yang termasuk dalam ajakan memilih seperti simbol contreng, tanda coblos, gambar paku, dan diksi yang mengajak untuk memilih.

Penertiban alat peraga di wilayah Kecamatan Samarinda Kota berlangsung di beberapa titik, yaitu Jalan Imam Bonjol, Jalan Abul Hasan, bantaran Sungai Karang Mumus, dan Jalan Arif Rahman Hakim.

“Kami menyisir beberapa lokasi dan menertibkan alat peraga dari berbagai partai politik serta calon legislatif dari tingkat daerah hingga pusat,” ungkap Signa

Terkait pemasangan alat peraga, Signa mengimbau agar peserta pemilu dapat berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU agar tidak menyalahi aturan, serta memasang alat peraga yang memiliki izin dan disertai tanda bahwa telah membayar pajak, dan lokasi pemasangannya memperhatikan tata keindahan kota.

Untuk diketahui, kampanye resmi calon legislatif baru dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau 3 hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Pewarta : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari

RADAR SAMARINDA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Talkshow UMKM Di Lapangan Parkir Samarinda Square

DORONG KEMAJUAN UMKM, DISPERINDAGKOP KALTIM GELAR TALKSHOW PENGEMBANGAN UMKM

SAMARINDA - Dinas Perindustrian, Koperasi, Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur (Disperidagkop Kaltim) menggelar Talkshow yang bertajuk "Meneropong Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM Di Kalimantan Timur", pada Sabtu (4/11/2023). Acara ini dilaksanakan di lapangan parkir Robinson Samarinda Square.

Dalam talkshowb tersebut menghadirkan pembicara yaitu, Husain Firdaus selaku Founder Forum Milenial Nusantara dan Ari Setiawan selaku Ketua UKM Kewirausahaan FEB Untag Periode 2023.

Dalam talkshow yang berfokus pada peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi tersebut, Husain mengungkapkan bahwa UMKM sebagai critical engine memiliki peran strategis dalam menopang kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

"UMKM ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Saat pandemi covid, sektor UMKM terpukul namun mampu survive hingga saat ini. Sehingga UMKM harus terus berinovasi untuk kemajuan ekonomi," tutur Husain

Terkait Kaltim yang menjadi daerah Ibu Kota Negara baru, menurut Husain, proyek strategis pembangunan ibu kota negara baru dapat menjadi peluang usaha berbagai sektor, salah satunya adalah UMKM.

"Proyek IKN ini bisa menjadi magnet pertumbuhan ekonomi. IKN bisa menjadi nilai tambah agar kita dapat menstimulasi perkembangan UMKM," kata Husain

Lebih lanjut, Husain menuturkan bahwa anak muda yang berbisnis harus berinovasi dan berkontribusi agar dapat mengembangkan usahanya.

Kemudian dilanjutkan oleh Ari Setiawan, selaku Ketua UKM Kewirausahaan FEB Untag Samarinda. Menurut Ari, anak muda khususnya mahasiswa tertarik untuk berwirausaha. Namun, banyak yang takut untuk memulai usaha karena kurang modal. Sementara itu, Ari juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah memberikan solusi pinjaman modal usaha dengan bunga yang rendah.

"Banyak mahasiswa yang tertarik berbisnis tetapi terhalang modal usaha. Tetapi hal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kota Samarinda yang memberikan bantuan dana usaha," ujar Ari

Mengenai transformasi ekonomi digital, Ari mengungkapkan bahwa digitalisasi dapat menjadi peluang dalam perkembangan UMKM. Pelaku ekonomi dapat memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan jasanya. Namun hal ini harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur.

"UMKM harus memanfaatkan platform digital agar tidak tertinggal. Kami pernah mengunjungi suatu desa di Kaltimantan Timur yang dekat dengan kota, mereka memiliki produk kerajinan namun sulit dipasarkan karena terkendala jaringan di daerahnya," ungkap Ari

Ari berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan terhadap anak muda dalam hal berbisnis. Sementara itu, Husain berharap agar kita dapat memanfaatkan potensi ekonomi di Kalimantan Timur seperti pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari

Peternakan Sapi di Kaltim (Sumber: Dinas Peternakan)

KOMISI II DPRD KALTIM DORONG SEKTOR PETERNAKAN SIAP HADAPI IKN

SAMARINDA - Sektor peternakan di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk siap menangkap peluang pasar yang akan terbuka dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dipindahkan mulai 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.

Anggota Komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, dan peternakan, tersebut, mengatakan pihaknya ingin mengetahui potensi dan kesiapan sektor peternakan di Kaltim. Ia mengharapkan sektor peternakan bisa memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri, baik pada komoditas daging, telur, susu, maupun lainnya.

“Kami ingin sektor peternakan di Kaltim bisa meningkatkan kemandirian pangan, menjaga konsistensi dan kualitas produk, dan memanfaatkan hibah-hibah pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan,” kata Sapto.

Sapto menambahkan, sektor peternakan di Kaltim juga harus mengembangkan berbagai jenis ternak, tidak hanya daging sapi, tetapi juga kambing, lebah, walet, dan lainnya yang memiliki potensi ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral terkait peternakan, terutama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan pemerintah kabupaten dan kota.

“Supaya tidak ada tumpang tindih antar-sektor. Kami juga akan mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II, agar lebih komplit,” ujarnya.

Rapat Komisi II DPRD Kaltim bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim berlangsung Jumat lalu,(3/11/2023). Rapat itu merupakan bagian dari agenda untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2026. Turut menjadi pembahasan sinkronisasi sektor peternakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2022-2024 yang disahkan pada Maret 2023.(Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

RADAR SAMARINDA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno

AGIEL SUWARNO INGATKAN PERUSAHAAN TAAT PAJAK DAN PENDATAAN TKA

SAMARINDA - Komisi II DPRD Kaltim mengingatkan warga dan perusahaan di Kaltim untuk mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan dan mendata Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini disampaikan oleh Agiel Suwarno, Anggota Komisi II DPRD Kaltim.

Agiel mengatakan, banyak kendaraan yang beroperasi di Kaltim namun memiliki nomor polisi dari luar Kaltim. Sehingga berdampak negatif pada penerimaan pajak daerah.

“Kendaraan yang beroperasi di sini harus terdaftar dengan plat Kaltim, sehingga pajaknya masuk ke kas daerah,” ujarnya kepada awak media.

Selain itu, Agiel juga menyoroti masalah TKA yang bekerja di Kaltim. Ia meminta agar perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA bisa memberikan data yang akurat dan lengkap.

“Data TKA ini penting untuk mengetahui apakah mereka bekerja di satu kabupaten atau kota saja atau lintas daerah. Jika lintas daerah, maka retribusi atau IMTA-nya harus dibagi ke provinsi dan kabupaten atau kota,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Komisi II DPRD Kaltim sedang membahas Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ia berharap, Raperda ini bisa meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan dan TKA.

“Ini adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, asalkan dikelola dengan baik dan benar,” pungkasnya. (Eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Konsep Forrest City di IKN

IKN TAK MERUSAK HUTAN, WAKIL KETUA DPRD KALTIM: SUDAH DIATUR DALAM RDTR

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim tidak akan menimbulkan degradasi hutan, sebagaimana yang menjadi keresahan beberapa pihak.

Pasalnya, menurut Samsun sudah ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur penggunaan ruang dan kawasan hijau di IKN yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN bersama Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

"RDTR ini menjamin keberlangsungan hutan baik yang ada di kawasan IKN, maupun di sekitarnya. Termasuk juga penetapan kabupaten/kota dan kawasan hijaunya," kata Samsun, kepada awak media.

Samsun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan. Ia menjamin bahwa pemberian izin lahan di IKN akan dilakukan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan, dan tidak akan sembarangan.

"DPRD Kaltim akan mengawasi proses pembangunan IKN ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya," ujarnya.

Politisi dari PDIP ini menilai bahwa sektor perkebunan dan pertambangan justru yang paling banyak berkontribusi terhadap pembabatan hutan. Sehingga pengawasan harus kian diketatkan agar tak membuat gundul hutan di Bumi Etam.

"Yang sering babat hutan itu biasanya dari sektor perkebunan dan pertambangan. Itu yang harus kita waspadai dan atasi bersama-sama," tukasnya.

Upaya Pemerintah Mewujudkan IKN sebagai Forrest City

Selain mengatur penggunaan ruang dan kawasan hijau di IKN, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan konsep forrest city di kawasan tersebut. Forest City adalah konsep kota yang mengedepankan keberlangsungan hutan dan keanekaragaman hayati, serta keseimbangan antara manusia dan alam.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Forest City.

Seperti melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan penanaman, pembangunan pusat persemaian di Mentawir, dan pemulihan lahan bekas tambang.

Berupa untuk konservasi sumber daya alam dan habitat satwa, terkoneksi dengan alam, pembangunan rendah karbon, sumber daya air yang memadai, pembangunan terkendali, dan pelibatan masyarakat.

Upaya lainnya yakni mempertahankan keanekaragaman hayati dan stok karbon di kawasan IKN, serta menghindari deforestasi.

Dan tak luput masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan di IKN, serta memberikan hak-hak mereka.

Dengan sejumlah upaya tersebut, diharapkan Nusantara, di Sepaku, Kaltim, bisa menjadi kota dunia pada abad 21 yang berkelanjutan dan inklusif.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

RADAR SAMARINDA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Kunjungan Penasihat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi saat mengunjungi dan melihat pembangunan yang sedang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN)

MENDAGRI IZINKAN 3 ANGGOTA DPRD KALTIM STUDI BANDING KE JEPANG

SAMARINDA - Tiga anggota DPRD Kaltim mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan kunjungan luar negeri ke Jepang pada 5 - 11 November 2023. Mereka yang bertolak yakni Muhammad Adam (Hanura) dan Baharuddin Muin (Gerindra) dari Komisi II, serta H Abdul Jawad Sirajuddin dari Komisi III (PAN).

Izin tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kemendagri, H Suhajar Diantoro, yang ditandatangani pada 18 Oktober 2023. Surat itu merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemprov Kaltim yang diajukan oleh Pj Gubernur Kaltim. Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mengembangkan wawasan komparasi terhadap peran dan organisasi pemerintahan di Jepang.

Salah satu materi yang akan dipelajari oleh ketiga anggota DPRD Kaltim adalah penetapan dan pembinaan peraturan dalam prefektur wilayah. Selain itu, mereka juga akan membahas unsur penyusunan RAPBD dan APBD yang telah ditetapkan.

“Biaya dari studi banding ini dibebankan pada APBD Kaltim Tahun Angggaran 2023,” kata Suhajar beberapa waktu lalu.

Ini bukanlah kunjungan luar negeri pertama yang dilakukan oleh anggota DPRD Kaltim. Sepanjang tahun 2023, sudah ada empat gelombang kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPRD Kaltim. Kunjungan-kunjungan tersebut meliputi Meksiko dan Belanda.

Kerjasama Kaltim dan Jepang

Kunjungan anggota DPRD Kaltim ke Jepang juga dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama antara Kaltim dan Jepang dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan, pertahanan, dan energi. Termasuk harapan untuk memperluan kerjasama menyambut Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara.

Dari berbagai sumber, Indonesia khususnya Kaltim dan Jepang sendiri sudah menjalin hubungan di berbagai sektor. Diketahui Pemprov Kaltim dan lima perusahaan Jepang telah sepakat untuk bekerja sama membangun Ibu Kota Baru di Kaltim.

Dikabarkan pula, Kota Balikpapan ingin belajar dari Kota Yokohama Jepang tentang cara membuat kota pintar, angkutan umum, dan pengelolaan sampah.

Pemerintah Indonesia dan Jepang juga merencanakan bekerja sama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kaltim dengan melibatkan masyarakat. Termasuk sejumlah Kemeneterian yang menjadikan Kaltim objek kerjasama dengan Jepang, seperti Menteri Pertahanan Indonesia dan Jepang setuju untuk bekerja sama memindahkan senjata dan teknologi pertahanan. Dan Kementerian PUPR mengajak investor dan mitra bisnis Jepang untuk ikut membangun infrastruktur, energi terbarukan, dan kawasan hijau di Ibu Kota Baru.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono

KETUA KOMISI II HARAP PENGEMBANGAN KOPERASI TERUS DILAKUKAN

SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, menyebut

keberadaan koperasi sangat penting dalam perekonomian, dan harus mendapat dukungan dari pemerintah.

Koperasi sebutnya, adalah pilar ekonomi bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan, karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

“Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah,” paparnya beberapa hari lalu.

Keberadaan koperasi, ujarnya juga sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, kekeluargaan, kemandirian, dan demokrasi. Sehingga Ia menilai dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait harus diberikan agar koperasi di Kaltim makin sehat, kuat, dan kompetitif.

“Saya berharap koperasi di Kaltim dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk menciptakan sinergi dan inovasi,” ucapnya.

Politisi Golkar tersebut menjelaskan, bahwa Pemprov Kaltim sendiri, terus memberikan dukungan dan fasilitas kepada koperasi di Kaltim, seperti bantuan modal, sarana, prasarana, peralatan, manajemen, sertifikat halal, promosi, dan pembinaan SDM.

Berdasar data dari Disperindagkop Kaltim menunjukkan bahwa Kaltim memiliki 2.901 koperasi aktif dari total 5.745 koperasi yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Koperasi aktif ini berkontribusi pada ekonomi lokal melalui berbagai jenis usaha.

Perkembangan dan inovasi koperasi di Kaltim yang bergerak di berbagai jenis usaha, seperti produsen, konsumen, jasa, dan simpan pinjam dinilai Tiyo patut diapresiasi. Sementara itu, terdapat 2.844 koperasi tidak aktif di Kaltim.

“Ini menandakan masih banyak ruang untuk pertumbuhan dan aktivasi koperasi di masa depan,” bebernya.

Komisi II, sebutnya akan mengagendakan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disperindagkop Kaltim membahas lebih lanjut terkait perkembangan koperasi di Bumi Etam. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

RADAR SAMARINDA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub

RUSMAN AJAK MAHASISWA UNMUL KULIAH LAPANGAN DI KARANG PACI

SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub, ajak mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) mengikuti kuliah lapangan di DPRD Kalimantan Timur.

Kuliah lapangan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Rusman sebagai dosen dan anggota dewan. Sebanyak 30 Mahasiswa yang hadir, mendapatkan materi implementasi politik kekuasaan di DPRD oleh Rusman Ya'qub yang mengajar mata kuliah pengantar ilmu politik di Unmul. Mereka diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses politik di lembaga legislatif provinsi.

"Mahasiswa bisa belajar teori ilmu politik di kelas, tapi mereka juga harus tahu bagaimana prakteknya di lapangan. DPRD adalah tempat di mana politik kekuasaan berlangsung, di mana anggota dewan berkompetisi memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan publik," ujar Rusman, Kamis lalu (2/11/2023).

Politisi PPP ini menambahkan, DPRD juga bisa menjadi wadah pendidikan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Ia berharap, dengan adanya kuliah lapangan ini, mahasiswa bisa lebih mengerti tentang politik dan bagaimana berpolitik yang sehat. Rusman berencana untuk mengadakan kegiatan serupa secara rutin dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas di Unmul.

"DPRD ini milik publik, bukan hanya milik anggota dewan. Kami terbuka untuk menerima kunjungan studi dari siapa saja yang ingin belajar ilmu politik di DPRD, baik dari perguruan tinggi maupun dari sekolah-sekolah," ungkap Rusman. (Eky/ Adv/DPRD-Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Salehuddin

DPRD KALTIM AKAN EVALUASI PERDA PENDIDIKAN, UPAYA TURUNKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH

SAMARINDA - Angka putus sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) masih tinggi. Belasan ribu anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena berbagai masalah, terutama faktor ekonomi. Hal ini menjadi pemicu DPRD Kaltim untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan evaluasi perda itu bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah di Kaltim. Salah satu hal yang akan direvisi adalah persentase jumlah siswa kurang mampu yang harus diterima sekolah.

"Kita ingin meningkatkan persentase siswa kurang mampu yang harus diterima sekolah dari 20 persen menjadi 30 persen. Ini agar anak-anak di Kaltim bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan merata," kata Salehuddin, Jumat (3/11/2023).

Salehuddin menambahkan evaluasi perda itu juga sejalan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa memprioritaskan masalah ini dan memberikan dukungan kepada DPRD Kaltim.

"Kita berharap angka putus sekolah di Kaltim bisa terus menurun, meskipun secara bertahap. Kita juga berharap Pemprov Kaltim bisa bekerja sama dengan DPRD Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Evaluasi perda pendidikan ini merupakan salah satu agenda Bapemperda DPRD Kaltim. Salehuddin mengatakan evaluasi ini sudah dijadwalkan sejak 2022 dan baru terlaksana pada tahun ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim jumlah anak yang putus sekolah di Kaltim per jenjang pendidikan pada tahun 2020 mencapai lebih dari 9000 anak. Jenjang SMA menjadi yang terbanyak anak putus sekolah dengan 3.087 anak.

Di tingkatan SMK sendiri tercatat 1.651 anak yang tak melanjutkan pendidikannya. Sementara itu jenjang SMP 2.389 anak dinyatakan putus sekolah, dan jenjang SD mencapai 1.953 anak. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

RADAR SAMARINDA .COM
AKTUAL & TERPERCAYA

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji

MAHASISWA FISIP UNMUL BELAJAR POLITIK SANTUN DARI SENO AJI

SAMARINDA - Tak kurang 50 mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman (FISIP Unmul) mendapat pelajaran berharga tentang etika berpolitik cerdas dan santun dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji.

Para mahasiswa dengan almamater kuning khas dari Unmul tersebut, berkunjung ke Gedung DPRD Kaltim di Samarinda pada Jumat kemarin, (3/11/2023) dalam rangka kuliah umum.

Seno Aji mengapresiasi antusiasme mahasiswa terhadap politik. Ia memberikan pengarahan pada kuliah umum tersebut, tentang kepemimpinan daerah, hubungan DPRD dan pemerintah, serta tantangan dan peluang yang ada di bidang politik dan pemerintahan. Secara spesifik Politisi Gerindra ini, memberikan materi tentang etika berpolitik secara dengan santun.

"Kami harapkan adik-adik mahasiswa bisa menjadi generasi penerus yang berpolitik secara santun, tidak menjelek-jelekkan lawan politik," jelasnya usai kuliah umum.

Menurut Seno sejatinya berpolitik harus menggunakan cara-cara yang baik. Sehingga pendidikan politik yang beretika perlu disampaikan kepada generasi muda. Ia pun dalam kuliah umum itu mendorong para mahasiswa untuk tak segan terjun ke dunia politik.

"Kalau mereka merasa baik, ya harus terjun, supaya tidak diisi oleh orang-orang kotor. Itu yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa," ungkapnya.

Legislator Dapil Kutai Kartanegara ini, mengutarakan bahwa dunia politik semestinya berkompetisi dalam hal gagasan dan ide yang baik demi kebaikan dan kemajuan masyarakat. Bukan dengan hal-hal yang tidak bermoral yang membuat esensi dari politik memudar. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Grand Kartika HOTEL
OK!
TOBER
Deluxe Room
ONLY
Rp698.000,-
30% OFF
Rp488rb
NETT/NIGHT
benefits
Breakfast
2 pax
FREE
Laundry
Up To 2 pcs
FREE
Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2
FREE
Afternoon Tea
FREE
Mini Mantou
5 pcs
BOOK NOW
0811 581 3669
www.hotelgrandkartika.com